

REVITALISASI NILAI-NILAI KEINDONESIAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KONTEKS SISTEM KEAMANAN NASIONAL MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL¹

Oleh: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si²

PENDAHULUAN

“Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila” (Sapta Marga ke-1).

“Demi Allah saya bersumpah, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Sumpah Prajurit ke-1).

Kedua kalimat tersebut diatas betapa prajurit TNI menempatkan Pancasila yang merupakan ideologi negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia sebagai asas utama bagi kehidupan prajurit sebagai individu maupun kelembagaan TNI. Sejarah mencatat terbentuk TNI mengiringi lahirnya NKRI karena TNI terlahir dari rakyat yang sedang berjuang meraih kemerdekaan, mengusir penjajah dan kemudian ikut melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jenderal Besar Soedirman adalah tokoh besar yang mewarnai pergerakan perjuangan fisik kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Strategi dan taktik perang gerilya yang digunakan Jenderal Besar Soedirman bersama TNI dalam merebut dan mempertahankan RI sangat tepat dalam kondisi saat itu. Sehingga, TNI bersama rakyat dengan kekuatan yang masih sangat minim baik dari segi SDM maupun peralatan dan persenjataan tetapi mampu merebutkan Kemerdekaan RI, menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Keteladanan semangat pantang menyerah dan nilai-nilai kejujuran yang ditunjukkan oleh Panglima Besar Soedirman yaitu dalam keadaan sakit terpaksa harus ditandu masuk keluar hutan serta naik turun gunung untuk memimpin perjuangan bersama para pejuang dan rakyat mengusir penjajah dari bumi persada Indonesia.

Pada sisi lain NKRI terlahir juga oleh perjuangan politik yang dimulai sejak Kebangkitan Nasional 1908, kelahiran berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik, Sumpah Pemuda 1928, sampai Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada proses sampai dengan menjelang terbentuknya NKRI telah terjadi proses yang tidak mudah untuk menemukan ideologi negara. Pada proses kelahiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, terjadi pergumulan dan persaingan antara beberapa paham dan ideologi yang dianut oleh para pejuang dan elit politik pada saat itu yaitu berbasis Nasional, Agama dan Sosialis. Namun para *founding fathers* termasuk Bung Karno pada akhirnya menemukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang diangkat dari kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan terlahir melalui proses sejarah panjang yang dimulai dari terbentuk bangsa Nusantara, masa kejayaan Nusantara, masa penjajahan, masa pergerakan Nasional sampai dengan kelahiran NKRI melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

¹ Disampaikan dalam Sarasehan Pusbintal Mabes TNI Cilangkap, Rabu, 28 Oktober 2015

² Anggota DPD RI 2014-2019 Dapil Maluku, Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD-RI, Mantan Komandan Korps Marinir, Mantan Danpasampres, Mantan Gubernur AAL, Mantan Komandan Jenderal Akademi TNI, Mantan Irjen AL, Mantan Kepala Basarnas,

Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang terbentuk karena proses politik dimana bergabungnya berbagai suku bangsa dan daerah melalui kontrak politik pada saat Sumpah Pemuda 1928. Indonesia bukanlah sebuah benda yang terlahir sebagai barang jadi, namun sebagai organ hidup akan berproses melalui perjalanan sejarah ruang waktu serta hidup di tengah-tengah kehidupan dunia bersama negara-negara dan bangsa lain. Sehingga negara Indonesia mengalami proses membangsa dan menegara untuk beradaptasi dan bertahan hidup di tengah pergolakan dan dinamika kepentingan negara-negara lain. Ideologi dan dasar negara Pancasila juga mengalami dinamika dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno mengatakan, "*Untuk membangun suatu negara yang kuat, untuk membangun suatu pertahanan yang kuat, harus berpedoman pada ilmu Geopolitik*". Oleh karena itu Geopolitik merupakan bagian penting dalam mencermati dinamika perjalanan sejarah bangsa dan negara.

Perkembangan lingkungan strategis, geopolitik dan geostrategis yang selalu menyertai kehidupan dunia tentu akan menjadi hal yang penting dalam dinamika perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Proses globalisasi yang mendunia juga ikut menerpa Indonesia, sehingga selayaknya sebangsa yang hidup diantara pergaulan dunia tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian dengan trend global. Namun akibat globalisasi juga bermunculan permasalahan-permasalahan bangsa yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa termasuk Tentara Nasional Indonesia.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, TNI sebagai komponen utama perjuangan bangsa dan negara yang menempatkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional diharapkan akan menjadi garda terdepan dalam penerapan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila dari gangguan serta rongrongan berbagai ideologi global yang berkembang saat ini dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GEOPOLITIK INDONESIA

Pada akhir abad ke-19 pemikiran politik Negara, khususnya di dunia barat didominasi oleh teori Ratzel, Ritter dan Mahan, yang menganggap negara sebagai organisme serta pengaruh alam terhadap tata laku manusia atau geographical determinist. Adanya nasionalisme, rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan cinta tanah air membuktikan bahwa negara bukanlah sekadar ruang kosong (geographical humanist). Hakikatnya, geomorfologi yang harus dimanfaatkan dari segi politik, sehingga pemahaman ini melahirkan "the politics of geography" yang kemudian diberi nama oleh Rudolf Kjellen sebagai geopolitik yang merupakan suatu "science of the state".³ Friedrich Ratzel mengatakan antara lain, "... every nation has a space conception, that is an idea about the possible limits of territorial dominion.." "*The decay of every state is result of declining space conception*" (Andrew Gyorgy, Geopolitics, edisi 1971)⁴.

³Nono Sampono, S.Pi, M.Si, Geopolitik Maritim dan Pengaruhnya Terhadap Optimalisasi Pembangunan Nasional Indonesia Masa Depan, 2008.

⁴Wahyono. SK. Indonesia Negara Maritim. 2007

Besar kecilnya penghayatan suatu bangsa atas konsepsi ruang hidupnya akan menentukan besar kecil wilayah Negara tersebut. Bahkan, Ratchel memandang bahwa hidup sebagai perjuangan merebut ruang hidup... *"life as a fight for space"*.

Lebih lanjut, dikatakan faktor alam sangat menentukan The State and Political Power. Artinya, kekuatan negara banyak ditentukan oleh faktor geografis, yaitu letak, luas, bentuk, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan hubungan internasionalnya.

Dengan demikian, terlihat geopolitik mengajarkan kepada kita bahwa wilayah bagi suatu bangsa merupakan ruang hidup yang harus dimiliki, dikelola, dimanfaatkan dan dipertahankan. Ada perbedaan para ahli geopolitik saat itu seperti Ratzel, Ritter dan sebagainya yang lebih berorientasi kontinental. Alfred Thayer Mahan, seorang pelopor orientasi maritim mengatakan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada faktor luas wilayah daratan dan isinya, akan tetapi sangat tergantung pada faktor luasnya akses ke laut, termasuk bentuk pantai dari wilayah negara. Karena akses ke laut akan memudahkan perdagangan keluar atau sebaliknya dan penguasaan ekonomi sehingga akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa tersebut.

Sejarah mencatat kegemilangan beberapa bangsa di masa lalu sampai saat ini karena mau dan mampu memanfaatkan laut untuk mengejar kepentingan nasional mereka. Karya AT Mahan sebagai orientalis maritime tersebut ikut mendorong Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, dan Belanda memanfaatkan kekuatan laut nasional, sehingga menjadi super power di masa lalu dan kini Amerika, Russia, Jerman, Cina, Jepang dan India menjadi super power, karena memiliki Maritime Power yang besar dan kuat.

*"Untuk menyusun Pertahanan nasional yang kuat..... dan bangsa yang kuat..... Harus berdasarkan kepada OBYECTIEF GEGEVEN nya apa? **Pertama**, Bahwa Indonesia adalah satu ARCHIPEL, Indonesia lain dari pada India, lain dari pada RRC, lain dari pada Jerman. Indonesia adalah Benua Maritim, yaitu Lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, tiap-tiap anak kecil bisa menyatakan dan mengerti hal itu. **Kedua**, ARCHIPEL ini diletakkan oleh Tuhan diantara Dua Benua dan Dua Samudera, sehingga aku katakan Indonesia menduduki posisi silang, KREUZ POSITION kata Karl Houshofer. **Ketiga**, Indonesia ini yang terdiri sekian pulau yang mempunyai RESOURCES yang amat kaya, baik tanah yang subur maupun buminya mengandung mineral-mineral tambang yang tiada taranya didunia. **Keempat**, Bangsa Indonesia adalah sebenarnya QUA RAS INTERRELATED dengan bangsa-bangsa yang mendiami Kepulauan Pasifik, Indocina sampai Madagaskar..... oleh karena itu Kerajaan MERINA Rasia Historisch (Madagaskar) ada hubungan dengan bangsa kita. **Kelima**, kita harus mengetahui bahwa kultur Indonesia, unsure Islam ada disitu, unsure Kristen ada disitu, unsur Hindu ada disitu, unsure Tionghoa ada disitu, unsur asli Indonesia ada disitu".* Demikian ungkapan Bung Karno pada pembukaan Lemhanas yang sekaligus pemberian kuliah perdana pada 20 Mei 1965. (Ermaya dan Alex Dinuth 1999 pada Wawasan Nusantara Geopolitik Indonesia).

Terlihat bahwa Bung Karno adalah pewaris ilmu geografi dan geopolitik dari Fiedrick Ratzel, Mackinder, Houshofer, tapi sekaligus juga AT Mahan. Isi pidato inilah terutama 5 hal pokok tersebut dikenal sebagai Wawasan Nusantara merupakan Geopolitik Indonesia menjadi pokok-pokok pikiran tentang Ketahanan Nasional RI (Political Strategical Guidance).

SEJARAH KELAHIRAN KEBANGSAAN, IDEOLOGI DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Proses Kelahiran Kebangsaan

Seabad yang lalu tepatnya pada tahun 1908, Kebangkitan Nasional digelorakan oleh kaum terpelajar (pemuda) sebagai jawaban kultural untuk membebaskan rakyat dari nasib dan penderitaan penjajahan selama \pm 350 tahun. Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu yang berjuang secara fisik mengangkat senjata dan bersifat kedaerahan, perlu dikoreksi menjadi perjuangan politik dan berskala nasional sebagai sebuah bangsa.

Motif kelahiran nasionalisme atau kebangsaan adalah sebagai respon terhadap adanya penindasan dan kesewenangan penjajah, oleh karenanya rakyat menemukan momentum dan berani melakukan perlawanan. Hal ini merupakan revolusi kebudayaan dari sebuah kesadaran terhadap nasib bangsa, melalui perubahan tata nilai yang menyatakan kesadaran berbangsa dari seluruh pelosok tanah air. Apa yang digelorakan dalam semangat Kebangkitan Nasional dan Politik adalah proses dari Revolusi Berpikir (perubahan kultural), kemudian melahirkan dan menggunakan Revolusi Rakyat untuk merebut kekuasaan dari tangan penjajah.

Pada tahapan selanjutnya, kristalisasi nilai-nilai terus berkembang dalam mengisi era perjuangan bangsa, terlahir organisasi-organisasi perjuangan termasuk berdirinya partai-partai politik dengan latar belakang berbagai paham ideologi. Selanjutnya lahir "Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan sebuah kontrak politik pemuda sebagai representasi dari suku bangsa dan daerah (Jong Java, Jong Sumatera, Jong Borneo, Jong Sulawesi, Jong Ambon, dan lain-lain) yang menyatakan : satu bangsa yaitu Bangsa Indonesia, bertanah air satu, Tanah Air Indonesia serta memiliki Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Proses panjang dari dialektika pemikiran kebangsaan fundamental menyatukan perbedaan yang ada dengan lahirnya "*Pancasila*", kemudian membentuk simbol "*Bhineka Tunggal Ika*". Perjuangan tidak pernah berhenti hanya dengan ideologi, sehingga klimaks dari perjuangan untuk merebut Kemerdekaan yaitu dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam catatan sejarah terjadi 2 (dua) peristiwa dimana 2 (dua) kelompok mayoritas merelakan kedudukan dominannya demi persatuan bangsa. Pertama, para Pemuda Jong Java pada Sumpah Pemuda 1928 merelakan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan (Indonesia). Kedua, umat Islam merelakan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak menuntut kedudukan khusus dalam UUD 1945. Oleh karenanya sejak awal terbentuk negara bangsa (Indonesia) realita kemajemukan adalah sebagai berkah. Kemajemukan harus disyukuri dan dikembangkan sebagai sendi dasar ideologi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pemaknaan keragaman pluralisme, multikulturisme sebagai toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Dalam pemahaman kita pada periode kekinian ketika Nasionalisme atau Kebangsaan belum dapat meningkatkan taraf hidup peradaban (ketidakadilan dan kemiskinan) maka

nasionalisme akan semakin meredup, oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama bahwa sesungguhnya nasionalisme sangat diperlukan untuk memperkuat tekad dan semangat bangsa, sehingga dapat ditempatkan posisinya dalam kehidupan ke-Indonesiaan bahkan hubungan antar bangsa-bangsa didunia secara terhormat dan bermartabat.

Proses Kelahiran Ideologi Pancasila

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.

Dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, kelahiran perumusan Ideologi Indonesia melalui proses yang panjang, sehingga dapat dibagi dalam empat (4) fase besar, antara lain:

1. Fase Dalam Kandungan

Nusantara yang terdiri dari 17.500 pulau besar dan kecil yang tersebar pada bentangan lautan yang luas. Berada pada persilangan antara 2 benua dan 2 samudera. Dengan daya tarik Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah membuat Nusantara menjadi titik temu penjajah bahari yang membawa arus peradaban, sehingga menjadi taman dari peradaban dunia. Selain itu, jenius Nusantara merefleksikan sifat tanah yang subur memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai sifat tanahnya untuk menerima dan menumbuhkan. Sehingga apapun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Penindasan ekonomi-politik oleh kolonialisme-kapitalisme memang banyak menggerus sifat-sifat kemakmuran, kosmopolitan, religious, toleransi dan kekeluargaan. Disisi lain, muncul unsur-unsur emansipasi baru yang mereduksi dengan nilai-nilai yang mereka bawa seperti humanisme, perikebangsaan, demokrasi dan keadilan yang instan memperkuat karakter kebangsaan atau nasionalisme (ke-Indonesiaan). Bersenyawaan nilai-nilai inilah dalam jiwa dan menampilkan visi emansipasi baru bangsa Nusantara sebagai sumber jati diri, dasar falsafah dan pandangan hidup bersama.

Ketika Dr. Radjiman Widiyodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta sidang untuk mengembalikan Dasar Negara Indonesia merdeka, permintaan tersebut menimbulkan rangsangan amumeris yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa kedalamnya dan pada akhirnya mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam oleh sejarah masa lalu.

2. Fase Pemuatan

Pada akhirnya terlahir prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (Bung Karno) yang digali dari bumi sejarah Nusantara, dan itupun tidak hanya sebatas zaman gelap penjajahan, tetapi menerobos ke belakang hingga zaman kejayaan Nusantara. Karenanya dalam catatan sejarah telah terjadi perumusan Ideologi untuk sebuah negara merdeka (Indonesia), yaitu:

- a. Pada tahun 1924, Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda mulai merumuskan ideologi politik, bahwa tujuan kemerdekaan politik harus berdasarkan pada empat (4) prinsip: Persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Konsepsi Ideologi PI merupakan buah sintetis dari ideologi-ideologi terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema dari Indische Partij, non-kooperasi merupakan platform politik kaum komunis, dan kemandirian merupakan tema dari Sarikat Islam. Sedangkan solidaritas merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema utama tersebut.
- b. Pada tahun 1924 seorang tokoh pejuang Tan Malaka menulis buku “New De Republick Indonesia (Menuju Republik Indonesia), menyatakan bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Karena keperluannya terhadap kenyataan bahwa bangsa Nusantara terdapat golongan mayoritas (Islam) yang kuat sehingga komunis harus bekerjasama dengan Pan-Islamisme.
- c. Hampir bersamaan Tjokroaminoto juga mengidealisasikan suatu sintetis antara Islam, Sosialisme, dan Demokrasi. Dikatakan “Jika kita kaum Muslimin, yang benar-benar memahami dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran Islam, maka kita pasti akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati.”

3. Fase Perumusan

Secara historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Rajiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Proses perumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, disampaikan beberapa tokoh, antara lain:

Rumusan Dasar Negara Mr. Muhammad Yamin

Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin diberikan pertama untuk menyampaikan rumusan dasar negara. Dasar negara digagas oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya dihadapan peserta sidang BPUPKI, antarlain: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat. Setelah berpidato Muhammad Yamin merumuskan rancangan UUD RI. sebagai berikut :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
- c. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Dasar Negara Mr. Soepomo

Mr. Soepomo diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan tanggal 31 Mei 1945. Adapun dasar negara gagasan Mr. Soepomo yang disampaikan dalam sidang BPUPKI, sebagai berikut :

- a. Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik. Maksudnya Negara Indonesia merdeka tidak akan

mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang mengatasi segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil.

- b. Setiap warganegara dianjurkan takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Dalam Negara nasional yang bersatu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- c. Mengenai kerakyatan Mr. Soepomo mengusulkan agar dalam pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk sistim Badan Permusyawaratan. Oleh karena itu kepada Negara harus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan agar mengetahui dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat.
- d. Dalam lapangan ekonomi, Prof. Soepomo mengusulkan agar sistim perekonomian Negara nasional yang bersatu itu diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini merupakan sifat dari masyarakat timur, termasuk masyarakat Indonesia.
- e. Mengenai hubungan antar bangsa mengusulkan supaya Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur Raya yang merupakan anggota dari pada kekeluargaan Asia Timur Raya.

Apabila kita analisis pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Soepomo di atas, maka dapat kita peroleh adanya lima hal untuk dasar Negara Indonesia merdeka. Meskipun tidak dituliskan secara terperinci. Prof. Dr. Soepomo menyarankan Negara Indonesia memilih teori Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan.

Kelima pokok pikiran tersebut sebagai berikut:

- a. Paham Negara Persatuan
- b. Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan
- c. Sistem Badan Permusyawaratan
- d. Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan
- e. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya

Jika kita analisis perbandingan dengan rumusan Pancasila yang sekarang (Pembukaan UUD 1945), pokok-pokok pikiran Soepomo itu termasuk dalam rumusan Pancasila. Pokok pikiran pertama termasuk sila ketiga. Pokok pikiran kedua termasuk sila pertama. Pokok pikiran ketiga termasuk sila keempat. Pokok pikiran keempat termasuk sila kelima dan pokok pikiran kelima masuk dalam sila kedua. Gagasan penting paham negara integralistik Mr. Soepomo diterima dalam sidang BPUPKI tersebut.

Rumusan Dasar Negara Ir. Soekarno

Gagasan dasar negara oleh Ir. Soekarno disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ada lima usulan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI 1 Juni 1945 tersebut, antara lain:

- a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
- b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- c. Mufakat dan Demokrasi
- d. Kesejahteraan Sosial

e. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

4. Fase Pengesahan

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya Ir. Soekarno mengusulkan rumusan dasar yang digagasnya dengan nama “Pancasila”. Usulan mengenai nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia secara bulat disepakati dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dan ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.

Setelah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Kemudian terbentuklah Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrokusumo, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin.

Pada fase ini kelompok agama mayoritas Islam menyodorkan “Piagam Jakarta” dengan mencantumkan tujuh kata setelah sila pertama “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun mendapat pertentangan dari kelompok Nasionalis dan Non-Muslim, sehingga memerlukan rembukan dan kesepakatan para tokoh-tokoh tersebut dan pada akhirnya menemukan tiga kata yaitu : “Yang Maha Esa” untuk menggantikan ketujuh kata tersebut.

Tim sembilan ini bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara yang berdasarkan atas pidato yang diutarakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui proses persidangan selama tiga hari, yaitu 29 Mei – 1 Juni 1945 akhirnya Pancasila yang digagas Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sejarah Kelahiran TNI

Pada awal kemerdekaan RI terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR bermetamorfosis menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kemudian TKR kembali berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Setelah proklamasi Kemerdekaan RI, dalam rangka menegakkan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan RI, terbentuk beberapa laskar-laskar perjuangan atau Badan Perjuangan Rakyat. Kemudian 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat dengan mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam perjalanannya, Desember 1949 dibentuk Angkatan Perang RIS yaitu gabungan antara TNI dan KNIL. Perubahan ini setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) Indonesia

berubah menjadi negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, pada tanggal 17 Agustus 1950 APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Dalam rangka terciptanya efisien dan efektifitas dalam melaksanakan peran sebagai garda terdepan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI, pada tahun 1962 ada upaya penyatuan APRI dengan kepolisian dibawah payung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian 1 April 1999 secara resmi ABRI kembali menjadi TNI dan kepolisian menjadi institusi tersendiri.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).⁵ Pendirian BKR bertujuan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), sebelumnya Badan Pembantu Prajurit dan berubah menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho.⁶ Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk Pembentukan BKR dalam pidatonya Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan.⁷

Pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama **Tentara Keamanan Rakyat**. Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Melihat kondisi sudah mulai tidak aman, kemudian Pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Oerip Soemahardjo dan diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara.

Kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi **Menteri Keamanan Rakyat** dan **Pemimpin Tertinggi TKR**. Namun, Suprijadi sampai awal November 1945 tidak pernah muncul sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Oleh karena itu, pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.⁸ Pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama **Tentara Keamanan Rakyat** menjadi **Tentara Keselamatan Rakyat**. Pembentukan TKR bertujuan untuk

⁵Markas Besar TNI (2000). *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. Jakarta: Pusat Sejarah Dan Tradisi TNI. Hal. 1

⁶*Tentara Nasional Indonesia Jilid I, cet II*. p. 106.

⁷*Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. p. 17.

⁸*Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. p. 25.

memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan Maklumat penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946 pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia.

Selain itu, untuk mewujudkan tentara yang sempurna dan menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militerinternasional, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma.⁹

Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 1946 panitia besar penyelenggara organisasi tentara mengumumkan rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat. Pada tanggal 25 Mei 1946 Presiden Soekarno melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juni 1947 meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional yaitu menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.¹⁰

Pasca proklamasi Kemerdekaan RI, dimana perekonomian belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar. Selain itu, hasil dari Perjanjian Renville yaitu semakin mempersempit wilayah Republik Indonesia. Beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatera yang dikuasai berada dalam keadaan ekonomi yang memprihatinkan akibat blokade oleh Belanda. Melihat kondisi ini, Z. Baharuddin sebagai salah satu anggota KNIP mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota angkatan perang.

Kemudian perkembangan selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948 dengan memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) dan mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara, Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil yaitu diangkat Jenderal Soedirman. Sedangkan, pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus. Sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.¹¹

Adapun Keputusan Presiden diatas menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 9

⁹ *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. p. 32.

¹⁰ *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. p. 48.

¹¹ Kusnodiprodjo (1951). *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1947*. Jakarta. p. 336

Tahun 1948 yang membatalkan penetapan lama dan mengeluarkan penetapan baru yaitu Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).

SPEKTRUM KEAMANAN NASIONAL

Berangkat dari analisa terhadap trend perkembangan lingkungan strategis dewasa ini maka perkembangan spektrum keamanan nasional semakin kompleks terutama dalam lingkup tugas angkatan perang (militer) sebuah negara. Saat ini maupun dimasa mendatang kehadiran angkatan perang (militer) sebagai bagian dari kekuatan nasional yang bertanggung jawab atas terpeliharanya keamanan nasional baik terhadap ancaman keras maupun lunak. Oleh karena itu sangat diperlukan angkatan perang yang mampu merespon segala tantangan dan ancaman sesuai paradigma keamanan nasional dalam rangka pertahanan negara dengan melakukan operasi militer dan non-militer.

Sistim Keamanan Nasional (National Security System) untuk menjamin terselenggaranya kepentingan utama nasional (National Vital Interest) yang menyangkut keamanan, kedaulatan nasional, wilayah nasional, keamanan dan ketertiban masyarakat, nilai-nilai bangsa, sumber daya alam, serta aset-aset nasional dan internasional dalam rangka stabilitas nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Ancaman saat ini terhadap sebuah negara tidak mengenal batas negara, bersifat transnasional, non-fisik (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan), berbentuk asimetris, non-linier dan extra-ordinary serta selalu mengeksploitasi kerawanan-kerawanan masyarakat (ras, suku dan agama). Oleh karena itu sistim keamanan nasional harus memiliki paradigma baru tentang sistim pertahanan keamanan "One integrated national effort". "Soal keamanan nasional adalah soal nasional, bukan soal militer saja tapi soal kita semua" (A.H. Nasution, Menuju Tentara Rakyat, 1962).

Oleh karenanya hadirnya angkatan perang bukan semata karena ancaman militer tetapi berkaitan dengan kepentingan nasional terutama dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa dalam rangka penguatan ketahanan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan). Secara ideal, diperlukan kekuatan angkatan perang (militer) yang memadai dalam rangka :

1. Mampu menjamin kelangsungan dan kepentingan nasional.
2. Mampu memberikan dampak penangkalan terhadap ancaman dari luar dan dalam.
3. Mampu mengawal proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Mampu membangun kekuatan matra (AD, AL dan AU) secara proporsional sehingga saling mengisi dan memperkuat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif wilayah nasional (negara kepulauan).

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL

Globalisasi Melanda Dunia dan Indonesia

Dalam aspek budaya kapitalisme global (negara-negara adidaya dan perusahaan-perusahaan transnasional) bertindak sebagai penulis skenario, sutradara, produser sekaligus pemain utama telah memoles dunia menjadi panggung kehidupan global. Mereka telah mendisain kebudayaan global yaitu dengan mengkonstruksi kebutuhan hidup, mendikte selera dan gaya hidup dengan menggunakan media (TV, Internet, Social Media), lebih celaka lagi ditiru secara membabi buta oleh konsumen budaya negara-negara dunia ketiga (Indonesia). Muncul “ideologi materialisme” (pemujaan terhadap kebendaan), kriteria kehidupan berdasarkan ukuran kebendaan, kepemilikan dan kekuasaan, mengabaikan nilai-nilai moral, kekayaan rohani, kesederhanaan, cinta kasih dan kesetiaan. Arus global yang didominasi barat melahirkan budaya dan gaya hidup baru yang dikemas oleh industri hiburan bagaikan “pabrik mimpi” yang merasuk ke kalangan muda yang sedang gelisah mencari identitas diri.

“Telah terjadi metaformosis (pergesaran tata nilai) dari ruang budaya (culture space) ke ruang komersial (commercial space)”. (Teremy Zifkin, *The Age of Ecces*, 2003). Hal ini tentu akan mengancam nilai-nilai kebangsaan, pluralisme budaya, nilai-nilai agama serta dunia pendidikan yang merupakan roh ke-Indonesia-an.

Kehancuran Russia dan Yugoslavia tidak lepas dari pengaruh terpaan globalisasi yang diawali dengan perubahan sosial budaya, ekonomi dan selanjutnya politik, padahal kekuatan militer masih utuh.

“Mereka yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah, dipastikan akan mengulangi sejarah itu kembali” (Those who failed to learn the lesson of history are dommed to repeat them, George Santayana, 1952). Bila dilihat dari sisi ekonomi tergambar bahwa dimasa lalu di abad ke-17 Belanda mulai menjajah Nusantara (Indonesia) melalui mekanisme korporatiokrasi VOC dengan kekuatan dagang dan militer. Mereka menguasai secara fisik wilayah Nusantara dan mengurus hasil bumi selama lebih dari 350 tahun. Saat ini terjadi pengulangan seperti masa lalu, namun format berbeda yaitu tidak ada pendudukan fisik dan militer tetapi kondisi faktual Indonesia telah kehilangan kemandirian dan kedaulatan ekonomi karena ketergantungan kepada kekuatan asing. Kekuatan-kekuatan korporasi telah mendikte sosial budaya dan perekonomian nasional antara lain pola hidup, kebijakan perdagangan, keuangan dan perbankan, penanaman modal, pertambangan bahkan media.

Globalisasi memberikan ruang terjadinya peningkatan peran aktor-aktor non negara dalam hubungan internasional (global). Mereka adalah NGO / LSM, perusahaan multinasional, media masa, dan civil society yang menjalankan multy track diplomacy, berkiprah di sektor keuangan internasional mampu mempengaruhi stabilitas ekonomi bahkan politik dan keamanan negara. Keunggulan komparatif negara-negara (target) semakin berkurang apalagi lemah dari aspek modal, iptek dan SDM, sehingga terjadi

ketimpangan dalam persaingan serta tidak mampu berkompetisi. Sehingga menyebabkan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya tidak stabil, berakibat muncul kejahatan trans nasional seperti penyelundupan SDA, manusia, obat-obat terlarang, imigran gelap, pencucian uang dan lain-lain.

Globalisasi telah mengantar masyarakat dunia ke dalam “global village”, dunia tanpa batas (borderless) yang melahirkan kesempatan keuntungan bagi negara-negara besar dan kaya, tapi di sisi lain terjadi kesenjangan yang sangat merugikan negara-negara berkembang. Benar kata Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, 2006, bahwa : “Globalisasi bermasalah bagi banyak negara (Indonesia)”. Faktor penyebabnya antara lain :

1. Aturan main tidak fair, karena dirancang hanya menguntungkan negara-negara kaya dan korporasi.
2. Hanya mengunggulkan nilai-nilai material.
3. Aturan-aturan perdagangan dunia cenderung menenggelamkan kedaulatan negara-negara miskin.
4. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan hukum pasar, sehingga memperlebar kesenjangan.
5. Modal / resep barat (Amerika dan Eropa) dipaksakan untuk harus diikuti.

Sehingga terjadi anomali globalisasi, uang mengalir dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, padahal seharusnya terbalik. Terjadi “kutukan SDA”, seharusnya SDA membawa berkah tapi dirubah menjadi kutukan. Yang terjadi “paradox of plenty”, sumber daya alam melimpah disuatu negara tapi rakyatnya tetap miskin.

Trend Perkembangan Lingkungan Strategis Asia-Pasifik

Perkembangan Lingkungan Strategis Regional semakin menegaskan bahwa telah terjadi perubahan dan transformasi strategis tentang adanya pergeseran pusat Geopolitik dan Geoekonomi global ke kawasan Asia-Pasifik. Indonesia secara geografis berada pada posisi strategis di pusat kawasan Asia-Pasifik serta sekaligus sebagai pendulum bagi negara-negara ASEAN tentu akan berada pada posisi dipengaruhi sekaligus dapat mempengaruhi terhadap lingkungan strategis tersebut.

1. Perkembangan Politik dan Keamanan

Ada beberapa tantangan Geopolitik yang dihadapi oleh Indonesia terutama dengan hadirnya Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai kekuatan pesaing dan penyeimbang Amerika Serikat (USA). Sementara Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia tentu akan mempertahankan supremasinya di kawasan Asia-Pasifik. Oleh karenanya stabilitas dan keamanan kawasan Asia-Pasifik sangat bergantung pada hubungan strategis kedua negara Adidaya tersebut. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

a. Konflik antara RRC dengan India

Berawal dari konflik tradisional tentang batas wilayah darat di perbatasan antara kedua negara yang terjadi di masa lalu yang kemudian meluas sehingga pernah terjadi beberapa kali perang terbatas, dimana secara silih berganti Uni Soviet dan kemudian Amerika Serikat berada dibelakang India. Saat ini, Amerika Serikat semakin intens memberikan dukungan kepada India terutama dalam membangun kekuatan militer darat maupun laut. Saat ini kekuatan militer AL India semakin besar

dan kuat sehingga mampu beroperasi di kawasan Samudera Hindia yang sewaktu-waktu dengan cepat dapat menjangkau ke kawasan Laut Cina Selatan.

b. Konflik antara RRC dengan Jepang

Perebutan wilayah perairan laut Kepulauan Seju yang diklaim baik oleh RRC maupun Jepang sampai saat ini belum terlihat penyelesaiannya. Konflik antara RRC dan Jepang sering terjadi karena pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga terjadi pengerahan kekuatan militer AL masing-masing negara. Sampai dengan saat ini, kekuatan pertahanan Jepang masih bersandar pada Amerika Serikat, sehingga pihak RRC masih harus menahan diri untuk bereaksi lebih keras.

c. Konflik antara RRC dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Terjadi perebutan wilayah di Kepulauan Spratly dan perairan sekitarnya antara RRC dengan beberapa negara ASEAN tersebut diatas berakibat kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan global menjadi sangat terganggu.

Dengan ditutupnya pangkalan militer di Filipina (Clark dan Subic), maka Amerika Serikat tentu akan memanfaatkan konflik di kawasan ini untuk membangun akses dengan kekuatan yang berhadapan dengan RRC. Saat ini Singapura memberikan fasilitas pangkalan logistik dan pemeliharaan bagi Armada ke-7 Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia-Pasifik. Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut dan Udara oleh Amerika dan Inggris di Diego Garcia serta penempatan pasukan Marinir di kawasan Australia tidak lepas dari antisipasi hal-hal tersebut diatas serta untuk menjamin keamanan terhadap aset-aset Amerika Serikat di kawasan selatan Asia-Pasifik termasuk di Indonesia.

d. Konflik antara Korsel dengan Korut

Dunia mengetahui bahwa siapa yang dibalik Korsel dan siapa yang dibalik Korut, sehingga memperjelas bahwa pada dasarnya konflik di semenanjung Korea yang berhadapan adalah RRC dan Amerika Serikat.

e. Konflik RRC dengan Taiwan

Walaupun saat ini Taiwan merupakan negara berdaulat sendiri namun kita mengetahui bahwa Amerika Serikat berada dibalik terbentuknya negara tersebut. Sesuai konstitusi RRC bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi sebagai bagian dari wilayah negara RRC sehingga kondisi ini menyimpan potensi untuk terjadinya konflik sewaktu-waktu.

2. Perkembangan Ekonomi Regional

Dinamika perkembangan dunia saat ini semakin mengglobal dan tanpa batas telah menemukan momentumnya ketika arus peradaban dunia menunjukkan kecenderungan episentrum ekonomi global lebih dari 70% bergeser ke kawasan Asia-

Pasifik, dimana 90% menggunakan transportasi laut, dan hampir semuanya melalui perairan Indonesia (ALKI I sampai ALKI III).

Dari perspektif perkembangan ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan yang sangat dinamis dan prospektif serta menjanjikan peluang bagi keberhasilan bagi negara-negara di kawasan tersebut.

John Naisbitt (1994) dalam bukunya *Global Paradox, The Bigger World Economy, The More Powerful its Smallest Players* mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik merupakan the rising sun.

Tergambar bahwa sebahagian besar negara-negara Asia Pasifik (21 negara) bergabung dalam *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan sangat diperhitungkan dunia, karena Gross Domestic Product (GDP) secara akumulatif telah mencapai 56% dari GDP dunia. Artinya, dalam catatan sejarah terkini bahwa kontribusi negara-negara Asia-Pasifik terhadap GDP global menunjukkan kecenderungan meningkat dari pada negara-negara barat.

Sementara itu muncul Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah merupakan kerja sama ekonomi antar negara-negara Asean agar dapat mentransformasikan diri menjadi kesatuan kekuatan ekonomi baik sebagai pasar maupun sebagai pusat produksi. Sekaligus ingin menciptakan kawasan Asean agar memiliki kemampuan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan setara dalam menghadapi pasar global. Asean adalah kawasan yang paling penting didunia, dengan jumlah penduduk 625 juta jiwa (9% dunia) tentu merupakan pasar yang sangat besar, tetapi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih rendah sekitar 40% dari Jepang atau 14% dari Amerika Serikat. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap akan semakin menjadi penting bagi percaturan ekonomi dunia, apalagi bila MEA mampu menjadi penggerakannya.

Saat ini Myanmar, Thailand, Laos dan Vietnam yang merupakan kawasan sekitar sungai Mekong membentuk kesepakatan kerja disebut sebagai Greater Mekong Subregion (GMS). Dimana akses transportasi darat antar negara-negara tersebut banyak membawa perubahan konektivitas dan pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat secara signifikan dikawasan tersebut. Apalagi Myanmar saat ini sedang membangun pelabuhan terbesar di Asia Tenggara dengan kedalaman lebih dari 20 meter yang sanggup menerima kapal sebesar apapun. Dengan lokasi strategis yang lebih dekat dengan Samudera Hindia, Timur Tengah dan Eropa serta langsung bisa berkoneksi dengan jalur perhubungan darat antar negara-negara yang tergabung dalam GMS tersebut, maka kapal-kapal tidak perlu melalui Selat Malaka atau berputar ke pelabuhan negara tujuan dikawasan Asean. Dengan demikian sangat mengancam Malaysia dan Singapura yang selama ini sebagai Transshipment utama di Asia Tenggara. Akibat dari kondisi ini maka diperkirakan akan berpengaruh terhadap konektivitas logistik bagi negara-negara Asean.

Persaingan antar negara-negara Asean terkait dengan pelabuhan laut dan udara pada akhirnya tidak bisa dihindari, akibat akan hadirnya pelabuhan Dawei di Myanmar. Namun secara faktual bahwa selama ini yang menjadi pemenang sebenarnya bukan semata karena megahnya infra struktur secara fisik, tapi bagaimana tata kelola perdagangan bisa berproses secara lebih cepat, efektif dan efisien, pelabuhan harus sebagai service agent, serta hubungan yang baik dengan maskapai pelayaran di seluruh

dunia. Oleh karena itu maka dalam konteks MEA kepentingan semua negara-negara Asean harus diakomodasikan dan dipersiapkan agar MEA dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi Asean.

Disisi lain, perlu dicermati perkembangan lingkungan strategis di kawasan Melanesia, karena sejak tahun 1986 terbentuk organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG beranggotakan negara Fiji, Papua New Guinea, Solomon Island, Vanuatu dan New Caledonia. Pada perkembangan selanjutnya, setelah tahun 1993, Maluku dan Papua juga telah ikut berpartisipasi dalam wadah ini. Tujuan MSG adalah mendorong dan memperkuat perdagangan antar negara anggota, pertukaran budaya, tradisi, nilai-nilai dan kesetaraan kedaulatan negara-negara Melanesia, mendorong kerjasama ekonomi dan teknik antara negara anggota dan untuk menyelaraskan kebijakan dan tujuan bersama tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan masalah keamanan. Pada tanggal 26 Juni 2015, Indonesia secara resmi telah menjadi Associate Member MSG.

Kawasan Timur Indonesia termasuk di dalamnya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat yang secara sosial budaya memiliki kesamaan etnis dengan penduduk di Melanesia dapat menjadikan organisasi ini sebagai peluang untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan melalui terbangunnya konektivitas dengan simpul-simpul ekonomi di kawasan Melanesia tersebut. Hal lain yang juga penting adalah, dengan wadah MSG dapat dilakukan dialog-dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terhadap issue separatisme yang sering mengemuka di kawasan timur Indonesia

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa di kawasan Asia-Pasifik baik di darat maupun di laut telah merupakan kawasan atau arena konflik antara RRC dan Amerika Serikat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat melibatkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik termasuk Indonesia. Sesuai konstitusi (UUD 1945) Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, sehingga tentu tidak akan memihak salah satu negara yang berkonflik (RRC dan Amerika Serikat). Namun, Indonesia harus mampu mengelola hubungan strategisnya dalam berbagai aspek agar mampu menciptakan Stabilitas dan Keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

Indonesia sebagai sebuah negara besar di Asia Tenggara dengan posisi geo-politik dan geo-ekonomi yang sangat strategis tentu dapat memainkan peran yang sangat sentral. Dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa (38% dari Asean), Pendapatan Domestik Bruto 36% dari total Asean atau Pendapatan Perkapita sedikit dibawah rata-rata negara Asean, tentu akan memosisikan Indonesia menjadi sangat strategis. Dalam kaitannya dengan trend perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas maka sangat relevan jika Indonesia dengan visi dan misi besar untuk menjadikan dirinya sebagai **POROS MARITIM DUNIA** agar dapat menghadapi tantangan-tantangan dan sekaligus dapat memanfaatkan dan merebut peluang-peluang regional dan global.

Oleh karena itu, dengan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

1. Menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik,

2. Menjamin keamanan dan kelancaran arus pelayaran di perairan Indonesia khususnya dari dan ke Laut Cina Selatan,
3. Melakukan Diplomasi Maritim dengan mengedepankan saling percaya dan kerjasama yang saling menguntungkan demi kepentingan bersama di kawasan,
4. Memperluas konektivitas ekonomi melalui Konsep Poros Maritim termasuk Tol Laut baik kearah barat (Dawei, Myanmar) maupun timur (Port Moresby PNG dan negara-negara Melanesia).

Untuk hal-hal tersebut diatas Indonesia perlu memperkuat posisi tawar politik dengan membangun kekuatan Maritim (Ekonomi dan Militer).

INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi tersebut adalah suatu cita-cita yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia dan juga merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau dengan sebagian besar wilayahnya (sekitar 70%) adalah berupa lautan yang sekaligus menjadi penghubung dua samudera utama dunia, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Tambahan pula, perairan laut di Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah “*megabiodiversity*” penting di dunia dan juga mengandung potensi sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya buatan, seperti: jasa-jasa lingkungan. Sebagai salah satu gambarnya adalah lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia¹².

Selain itu, gagasan Poros Maritim Dunia juga sekaligus akan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang seharusnya dijalankan sesuai dengan karakteristik geografis yang dimilikinya sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam mewujudkan cita-cita utamanya melalui proses pembangunan nasionalnya. Kemudian, agar visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tersebut dapat terwujud, maka dalam agenda pembangunannya ditetapkan lima pilar utama, yakni pembangunan budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan keamanan maritim. Visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tentu bukan merupakan perkara mudah untuk mewujudkannya. Karena bukan hanya sekedar membangun aspek ekonomi semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek kedaulatan dan kebudayaan bangsa Indonesia di masa depan. Kesadaran para pemimpin bangsa serta seluruh komponen masyarakat Indonesia akan “arti laut” bagi negara tercinta, patut dibangkitkan kembali sehingga dapat terimplementasikan secara nyata dalam wujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu melakukan terobosan berani sejak dini melalui re-orientasi atau membangun *mindset* (pola pikir) akan pentingnya

¹²Dahuri, R. 2014. <http://ugm.ac.id/id/berita/9256-potensi.kelautan.indonesia.12.triliun.belum.digarap.maksimal>

membangun paradigma jati diri bangsa Indonesia secara obyektif sesuai dengan karakteristik geografisnya yang berlandaskan kepulauan atau *archipelagic oriented*.

Telah banyak kebijakan dan doktrin untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia seperti masa lampau sebelum penjajahan Belanda yang lahir sejak era awal kemerdekaan hingga era reformasi, namun hingga kini orientasi bangsa Indonesia ke arah kemaritiman masih belum optimal, baik pada bidang ekonominya, sosial dan budayanya, maupun bidang pertahanannya. Akibat dari kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa paradigma pembangunan nasional kita belum berbasis kemaritiman atau kelautan. Setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang menjadi penyebab kehilangan orientasi visi kemaritiman, yakni: kehilangan orientasi akan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (maritim) terbesar di dunia, orientasi dan kesadaran diri sendiri sebagai bangsa maritim, orientasi terhadap wawasan nasional (Wawasan Nusantara) yang pada gilirannya memperlemah ketahanan nasional serta orientasi dan kesadaran tentang pentingnya laut bagi Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa terjadi sebuah perubahan paradigma nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar. Pada acara tersebut Presiden Joko Widodo mengumumkan hasrat Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Untuk itu, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, membangun pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Serta melalui diplomasi maritim mengajak mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan dan meniadakan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, penyelundupan, perompakan laut, dan sengketa wilayah.

Bila kita cermati secara mendalam maka seruan Presiden Jokowi tersebut bukan hanya sekedar gagasan, tetapi merupakan visi dan cita-cita besar membangun Indonesia sebagai seruan untuk kembali ke jatidiri bangsa sebagai bangsa bahari dan negara maritim sekaligus ingin membangun kekuatan maritim untuk Indonesia yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity). Disisi lain merupakan sebuah Doktrin yang merupakan arahan mencapai tujuan bersama (a sense of common purpose), mengajak kita untuk melihat diri sendiri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, serta realita posisi Geografi, Geostrategi, Geopolitik, dan Geo ekonomi. Serta merupakan upaya implementatif dan operasional untuk membangun kejayaan politik, ekonomi, dan keamanan melalui dibangun Tol Laut.

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa Presiden Joko Widodo bermaksud akan mengembalikan kembali kejayaan maritim bangsa Indonesia seperti pada masa-masa keemasan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam kaitannya dengan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka menurut pemahaman saya diperlukan kebijakan-kebijakan penunjang, antar lain : Membangun kesadaran nasional tentang budaya Maritim, membangun dan menyempurnakan tata kelola kelautan, membangun dan memperkuat ekonomi kelautan, membangun dan memperkuat sistem keamanan Maritim, serta pembangunan kelautan Indonesia berasas pada kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, akan terjadi perubahan dan pergeseran yang cukup radikal terhadap budaya politik dengan orientasi yang tadinya lebih kontinental menjadi ke maritim. Kondisi ini tentu akan memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, dan selanjutnya memerlukan beberapa langkah strategi sebagai fondasi yang kuat untuk memulai operasional, antara lain:

1. Diperlukan regulasi sebagai payung hukum dalam penguatan implementatif dan operasional,
2. Harus ada Ocean Policy agar menjadi rujukan bagi implementasi terutama dalam memandukan kepentingan lintas sektor dan berbagai stakeholder,
3. Kesiapan sistem yang ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas,
4. Pembangunan infrastruktur dan industri penunjang,
5. Diperlukan dukungan teknologi dan biaya cukup besar,
6. Untuk kepentingan jangka panjang diperlukan penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan muatan kemaritiman pada semua jenjang pendidikan.

PEMBAHASAN GLOBALISASI SERTA UPAYA REVITALISASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN, IDEOLOGI PANCASILA DAN PERAN TNI

Di era globalisasi pada abad ke- 21 ini, bukan hanya tantangan, tetapi juga sekaligus mempunyai peluang. Ditinjau globalisasi sebagai sebuah tantangan yaitu fenomena yang semakin *ekstensif*, yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi antar bangsa menjadi samar dan hubungan antar bangsa menjadi sangat transparan. Globalisasi memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Naisbitt (1994:20) dalam buku *Global Paradox* menyatakan bahwa semakin kita menjadi universal, semakin tumbuh pula sikap *primordialisme* (kesukuan). Ditinjau dari perspektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya. Di era globalisasi saat ini, bangsa-bangsa bersatu secara mengglobal, tetapi lahir pula rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan (*chauvinisme*).

Dalam menghadapi kondisi seperti ini posisi TNI dalam mengambil peran sangat sulit, karena bisa diartikan lain. Namun sebagai komponen bangsa yang ikut andil dalam mendirikan NKRI serta peran abadinya untuk menjaga keutuhan dan kelestarian bangsa dan negara, tentu harus ikut terlibat secara tepat tanpa keluar dari koridor undang-undang serta spirit Reformasi 1998.

Solusi Menghadapi Globalisasi

Efek globalisasi bagi bangsa Indonesia adalah memiliki tantangan tersendiri, dimana masyarakat Indonesia memiliki multi etnis dengan multi budaya, ada dua tantangan rentan melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. *Tantangan pertama*, tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap bangsa luar tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik.

Tantangan kedua, yaitu lahirnya kecenderungan dengan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan sumpah pemuda *satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa* tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada ancaman tuntutan *merdeka*, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.
- b. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta menjadi pasar *empuk* bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.
- c. Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan.
- d. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspada tentu saja yang bersifat negatif.

Mohammad Hatta pernah mengingatkan "...*Agar dalam proses membuka ekonomi kita bagi lalu lintas dagang dan investasi dunia luar, jangan sampai orang luar itu menunjukkan tanda dominasi yang menyolok.*" Gagasan Bung Hatta di atas, tidak sedang menyatakan chauvinisme ekonomi. Sebagai seorang negarawan, terlihat dalam pidato, tulisan dan kebijakannya, Mohammad Hatta sedang mengajukan satu implikasi ekonomi kerakyatan: akumulasi modal ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk akumulasi modal. Kemudian muncul gagasan Koperasi, dimana koperasi merupakan salah satu kemungkinan bentuk unit ekonomi kerakyatan yang sedang banyak dicoba di Eropa pada paruh pertama abad 20. Dalam tuturan Bung Hatta: "Sandarannya koperasi adalah orang, bukan uang. Koperasi merupakan kumpulan manusia, sedang uang faktor kedua."¹³

Kondisi negara Indonesia saat ini sedang dikepung arus gelombang globalisasi dan badai liberalisasi yang ganas yang siap melumpuhkan sendi-sendi dasar persatuan dan kesatuan serta patriotisme bangsa. Sanggupkah nakhoda kapal (pemerintah) dan seluruh kru (aparatur) beserta seluruh penumpang (rakyat atau masyarakat) mengatasi kemacetan mesin (pemerintah), sehingga negara bisa berfungsi normal kembali? Adapun solusi dalam menghadapi sisi negatif dari arus globalisasi antara lain :

- a. Kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Paling penting adalah memahami dan menghayati isi serta maknanya, dalam mewujudkan (implementasikan) dalam bentuk perilaku nyata (kepribadian bangsa) sehari-hari.

¹³Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, Gunung Agung: Jakarta, 1980., halaman 183-187

- b. Menjadikan UUD 1945 sebagai haluan (arah dan pedoman) untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Implementasikan isi dan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut secara konsekwen dan konsisten, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa dan bertanggung jawab.

Solusi dalam perspektif kebangsaan

Perubahan kultur dan struktur sebenarnya telah terjadi setelah terbentuknya NKRI, namun ketika hendak mengisi kemerdekaan diperlukan program-program pembangunan nasional yang kongkrit dan terukur, terutama dalam mewujudkan Tujuan Nasional, yaitu tercapainya kesejahteraan umum, keadilan dan kesejahteraan bangsa serta keikutsertaan dalam perdamaian dunia. Nasionalisme adalah merupakan spirit yang paling kuat untuk mempersatukan keragaman etnis dan budaya dalam sebuah negara (Indonesia) yang saat ini mendapat tantangan dari perubahan global seperti terjadi penguatan etnis, ras dan agama. Filosofi yang melandasi Kebangkitan Nasional adalah kebangkitan kesadaran politik untuk melawan penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan.

Namun bila diusia negara bangsa Indonesia ke-70 belum terealisasikan, hal tersebut karena :

- a. Belum terjadi transformasi budaya Pancasila secara fundamental, baik aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya.
- b. Budaya politik masih meletakkan kekuasaan sebagai tujuan serta telah terjadi politik uang.
- c. Budaya ekonomi mengembangkan budaya konspiratif (penguasa, pengusaha dan legislatif).

Oleh karena itu dengan fondasi nasionalisme Bhineka Tunggal Ika, Indonesia harus bangkit dengan spirit Nasionalisme yang baru, yaitu tetap loyal kepada bangsa dan negara tetapi melalui penghargaan terhadap HAM menuju masyarakat yang berkeadilan dan kesejahteraan. Ketidak berdayaan tradisi dan nilai-nilai ke-Indonesiaan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar tidak boleh dibiarkan, upaya modernisasi untuk proses kematian ke-Indonesiaan harus dicegah serta proses penghilangan identitas bangsa harus dilawan. Oleh karena itu perlu dilakukan Revitalisasi Budaya dengan menghargai budaya sendiri, perkokoh khasanah citra bangsa, tetapi harus ada "*konsensus nasional dan kepercayaan diri*".

Indonesia harus bangkit dengan "*Perspektif Baru*" yaitu maju dan modern tapi tetap mempertahankan nilai-nilai "ke-Indonesiaan". Indonesia Baru bisa dicapai bila dilakukan : transformasi budaya, menjaring dan mengadaptasi budaya Ilmu Pengetahuan yang sesuai dan bermutu, serta mengukuhkan jati diri bangsa yang berbasis kepada kebhinekaan budaya bangsa.

Revitalisasi Nasionalisme (kebangsaan) haruslah diyakini untuk kemajuan bangsa, spirit sama dengan masa lalu namun berbeda dalam konteksnya.

Pada masa lalu :

- a. Menghadapi musuh bersama “Penjajah” dengan membangun “Rasa Solidaritas”
- b. Memiliki tujuan bersama, yaitu “Indonesia Merdeka” yang mandiri sebagai sebuah bangsa.
- c. Merasa senasib seperjuangan karena ditindas dan dianiaya oleh bangsa asing, sehingga berjuang untuk merubah nasib bangsa.

Pada masa kini :

- a. Musuh bersama adalah : Korupsi-Kolusi-Nepotisme, Kebodohan dan Kemiskinan
- b. Tujuan bersama : Kemakmuran Bangsa
- c. Merasa senasib di bawah cengkeraman bangsa asing (hutang, teknologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dll)

Solusi Aspek Ideologi

Pancasila adalah rahmat bagi bangsa Indonesia karena merupakan ideologi yang sesuai dengan faham apapun yang dianut oleh bangsa Indonesia termasuk semua agama “Religiously Friendly Ideology”, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menggantikannya dengan ideologi lain (termasuk agama). Disamping itu Pancasila memiliki fungsi integratif yang menjamin kesatuan negara bangsa Indonesia dalam mempersatukan wilayah Nusantara serta mempersatukan keragaman (suku, budaya, agama dan bahasa). Bahwa memang ada disparitas dan disrepansi antara cita-cita ideal Pancasila dengan realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun Pancasila jangan menjadi “Kambing Hitam”.

Gejala meningkatnya pencarian dan upaya memasarkan ideologi lain (agama dan sosialisme komunisme) masih terlihat. Kalau faham Sosialisme Komunisme selalu bergerak secara tertutup dan terselubung, yaitu dengan memanfaatkan isu-syu ketidakadilan, kemiskinan dan pelanggaran HAM. Sedangkan faham agama tertentu akan lebih leluasa karena dapat bergerak berhimpitan dengan agama mayoritas, misalnya mendirikan partai politik, bahkan setelah berkuasa di daerah tertentu mengeluarkan Perda-Perda Syariah.

Jika berbagai komponen masyarakat bangsa di Nusantara mau menghargai, menerapkan dan mengembangkan berbagai budaya khasanah bangsa serta merasa bangga memiliki Indonesia maka kita harus membangun harapan yang sama terutama dengan muara akhir adalah penguatan Persatuan dan Kesatuan bangsa. Oleh karena itu dengan pemahaman bahwa Pancasila adalah “*Rumah Bersama*” terlahir dan merupakan warisan luar biasa pendiri bangsa yang mengacu pada nilai-nilai luhur yang bersifat orisinil sehingga akan tahan jaman, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih kongkrit untuk mengaktualkan semangat, prinsip dan nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan.

Pancasila merupakan sumber semangat, kearifan dan kekuatan bangsa, sehingga dapat digunakan untuk menyadarkan bangsa dalam menghadapi berbagai cobaan dan kemelut bahkan situasi kritis, serta sekaligus merajut kembali persatuan dan kesatuan yang telah retak. Bung Karno dan para founding fathers kita telah merumuskan Pancasila bukan sekedar sebagai dasar negara tetapi juga merupakan filsafat dan tata nilai dasar yang dapat digunakan sebagai kunci dan solusi untuk menjawab berbagai persoalan sekaligus untuk membangun bangsa untuk menuju Indonesia baru yang lebih baik.

Namun dalam implementasinya Pancasila harus dijadikan mitra dialog untuk menyaring berbagai paham dan ideologi yang masuk serta bersanding dan menjawab berbagai permasalahan bangsa secara terus menerus mengingat Pancasila bukan sebuah ideologi mati.

Posisi TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Profesional

Berbagai pandangan dan diskusi telah bermunculan seiring dengan berlangsungnya Era Reformasi 1998, dan pada kenyataannya TNI telah dan sedang melakukan reposisinya sesuai kehendak reformasi tersebut. Namun pada kenyataannya kondisi negara saat ini telah menimbulkan berbagai gejolak sosial budaya, ekonomi dan politik dan pada akhirnya dapat berimplikasi kepada masalah keamanan. Maka TNI harus mengambil posisi dan berperan bukan sebagai pemadam kebakaran. Memang bukan hal yang mudah, karena trauma masa lalu dimasa Orde Baru posisi TNI terkesan terlalu di depan dan telah mengambil posisi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan peran Dwi Fungsi ABRI. Oleh karenanya saat ini harus secara tepat dan benar serta tidak masuk pada tataran politik praktis, TNI harus tetap dapat berperan dalam menjaga stabilitas dan tetap menjaga kelangsungan pembangunan nasional termasuk berlangsungnya proses demokrasi.

“Kemerdekaan yang telah kita miliki harus kita pertahankan, jangan sekali-sekali dilepaskan dan diserahkan kepada siapapun yang akan menjajah dan menindas kita”.

“Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi”.

“Satu-satunya hak milik nasional republik yang masih tetap utuh tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, adalah hanya Angkatan Perang Republik Indonesia”.

(Panglima Besar Soedirman, 1945, 1947 dan 1948)

Ketiga penggal kalimat di atas sebagai warisan Panglima Besar Soedirman yang menempatkan posisi Tentara Nasional Indonesia sebagai Tentara Rakyat dan sekaligus Tentara Pejuang. Dalam konteks membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kebangsaan telah ditegaskan dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sebagai jiwa dan semangat perjuangan TNI. Oleh karena itu TNI tidak mengenal politik apapun kecuali politik negara, sebagai landasan untuk mengabdikan dan bertugas.

Sebagai Tentara Profesional tentu TNI harus patuh dan taat terhadap konstitusi dan undang-undang negara serta pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta kepentingan keutuhan dan kelestarian Negara Kesatuan Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap negara baik dari dalam maupun luar negeri maka TNI harus terlatih secara profesional dengan dilengkapi oleh sistem senjata dan alutsista yang memadai sesuai matra (AD, AL, dan AU) dalam menjalankan berbagai tugas dan pengabdianya baik operasi militer maupun operasi militer selain perang, yang aturan pelibatangannya sesuai keputusan politik negara yang diatur oleh Undang-Undang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan-pembahasan tersebut diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang sekaligus sebagai rekomendasi, yaitu :

1. Nilai-nilai kebangsaan masih sangat relevan untuk dapat didayagunakan bagi memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, namun harus dengan format baru, antara lain berjuang melawan ketidakadilan, menjunjung tinggi HAM, memerangi kemiskinan, memperjuangkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian serta memberantas KKN.
2. Pancasila adalah "*Rumah Bersama*" yang merupakan sumber semangat, kearifan dan kekuatan bangsa, sehingga merupakan kunci penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan untuk membangun peradaban bangsa yang maju dan bermartabat.
3. Globalisasi akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap hal-hal yang sesuai bagi kemajuan bangsa dan negara, namun menyaring bahkan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Ke-Indonesiaan.
4. Perkembangan lingkungan strategis dunia khususnya kawasan Asia-Pasifik mengharuskan Indonesia untuk berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan khususnya ASEAN, oleh karenanya Indonesia harus dapat menjadi Poros Maritim Dunia yang memiliki posisi tawar, kemampuan dan kekuatan baik politik, ekonomi dan militer.
5. Dalam konteks Sistim Keamanan Nasional kehadiran Angkatan Perang (TNI) adalah dalam rangka memperjuangkan dan mengawal kepentingan utama nasional yang menyangkut keamanan, kedaulatan nasional, wilayah nasional, sumber daya alam, termasuk nilai-nilai bangsa terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar baik bersifat keras maupun lunak, namun disesuaikan dengan keputusan politik negara dan undang-undang yang berlaku.
6. Posisi strategis TNI sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang dan prajurit profesional tidak sebagai penghambat untuk berperan dalam menjaga kelestarian nilai-nilai Ke-Indonesiaan khususnya nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.
7. TNI harus tetap dapat menjalankan proses reformasi tanpa menghilangkan jatidirinya sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang dan prajurit profesional dalam rangka mengawal proses pembangunan nasional termasuk proses demokrasi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai jatidiri bangsa.

PENUTUP

Semoga penulisan ini melengkapi berbagai literatur yang telah ada serta dapat dijadikan masukan dan perenungan bagi semua pihak terutama prajurit TNI dalam meneruskan pengabdianya kepada bangsa dan negara tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman Wahid.1991. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.

Asvi Marwan Adam .2011. "Mutlak, Hanya Satu Asas Pancasila", Copy Right ©2000 Suara Karya Online Powered by Hanoman-i - Sabtu, 11 Juni 2011

Gumilar Rusliwa Somantri,2006. Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern, *dalam Restorasi Pancasila : Mendamaikan politik Identitas dan Modernitas*, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok 31 Mei 2006, halaman 34.

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 - 2025, Pemerintah Republik Indonesia, 2010, halaman v.

Kaelan.2010. Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Paradigma.

Maarif: Pejabat Sudah "Alergi" Pancasila , posted Jodhi Yudono | Rabu, 1 Juni 2011 | 03:34 WIB

Revrisond Baswir.2009, Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Soerjanto Poespowardojo.1991. Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi Pandangan Hisup Bersama, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.

Otho H. Hadi, MA (Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas). *Nation and Character Building* Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan. Tulisan ini disusun dari hasil diskusi reguler Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas-red., www.google.com/otto-2000910150958/ diunduh, 10 Januari 2011, halaman 2-3

Yudi Latif (2011) Menghidupkan Pancasila, <http://www.gatra.com/artikel.php?id=148905>, Wednesday, June 08, 2011

Yudi Latief: Jangan Jadikan Pancasila Mitos Kamis, 9 Juni 2011 | 16:06 Copyright ©2011 **Investor Daily**, All Rights Reserved

<http://www.google.co.id/>

<http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/>

<http://kanal3.wordpress.com/2010/11/01/sejarah-lahirnya-pancasila/>

www.lautanindonesia.com

<http://wennduut.blogspot.com/2011/05/nilai-nilai-pancasila-sebagai-dasar.html>

www.bambangsmenic.blogspot.com